



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted April 01, 2025, Approved May 30, 2024, Published July 31, 2025

Respon Masyarakat di Desa Mopolo Esa dalam Menjaga Ketertiban Pesta Demokrasi Tahun 2024

Daniel Manikome¹, Romi Mesra²

^{1,2}program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: 120606032@unima.ac.id, 2romimesra@unima.1.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat Desa Mopolo Esa, Kecamatan Ranoyapo dalam menjaga ketertiban pesta demokrasi tahun 2024, khususnya dalam pemilihan kepala desa (Hukum Tua). Fokus penelitian meliputi cara masyarakat menggunakan hak pilih, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses demokrasi, serta mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola-pola respon masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki tiga dimensi respon utama: (1) respon preventif melalui edukasi informal, kesepakatan netralitas, pengawasan partisipatif, dan revitalisasi nilai budaya lokal; (2) partisipasi aktif yang berkualitas tinggi dengan keterlibatan dalam semua tahapan demokrasi, inovasi partisipasi digital, dan inklusivitas gender; (3) mekanisme penyelesaian konflik yang menggabungkan pendekatan formal-informal, filosofi "dingin kepala-panas dukungan", sanksi sosial efektif, dan evaluasi reflektif. Temuan mengindikasikan bahwa keberhasilan menjaga ketertiban demokrasi di tingkat desa sangat bergantung pada kekuatan modal sosial, civic engagement masyarakat, dan kemampuan mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip demokrasi modern, menciptakan model "indigenous democracy" yang autentik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Desa Mopolo Esa, Menjaga Ketertiban, Pesta Demokrasi

Abstract. This study aims to analyze the response of the Mopolo Esa Village community, Ranoyapo District, in maintaining order during the 2024 democratic party, especially in the village head election (Hukum Tua). The focus of the study includes how the community exercises its voting rights, maintains order and security during the democratic process, and prevents conflicts that could disrupt local political stability. The study uses qualitative methods with data collection techniques through participatory observation and in-depth interviews with purposively selected key informants, including village officials, community leaders, and ordinary citizens. Data analysis uses thematic analysis techniques with an inductive approach to identify community response patterns. The results show that the Mopolo Esa Village community has three main response dimensions: (1) preventive responses through informal education, neutrality agreements, participatory supervision, and revitalization of local cultural values; (2) high-quality active participation with involvement in all stages of democracy, digital participation innovation, and gender inclusivity; (3) conflict resolution mechanisms that combine formal-informal approaches, a "cool head-hot support" philosophy, effective social sanctions, and reflective evaluation. The findings indicate that the success of maintaining democratic order at the village level is highly dependent on the strength of social capital, community civic engagement, and the ability to integrate local wisdom with modern democratic principles, creating an authentic and sustainable "indigenous democracy" model.

Keywords: Community Response, Mopolo Esa Village, Maintaining Order, Democratic Party

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil. Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami transformasi sistem politik yang signifikan sejak era reformasi, dimana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan tidak hanya pada level nasional dan daerah, tetapi juga pada tingkat pemerintahan desa (Susanto, 2019). Implementasi demokrasi di tingkat desa menjadi sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga partisipasi dan respon masyarakat dalam proses demokrasi menjadi indikator kuat bagi kesehatan demokrasi Indonesia secara keseluruhan (Pratama, 2020).

Pemilihan kepala desa atau yang dikenal dengan istilah "Hukum Tua" di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, merupakan manifestasi nyata dari penerapan sistem demokrasi di level grassroot. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek politik, tetapi juga nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar dalam masyarakat (Gosamgo, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa memiliki peranan penting dalam membangun demokrasi yang kuat di tingkat desa, dimana melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan dan aspirasi mereka, mencegah korupsi dan nepotisme, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Caracek, 2023).

Pesta demokrasi tahun 2024 di Indonesia memiliki karakteristik khusus karena diselenggarakan dalam konteks politik yang dinamis, dimana masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi politik dalam menentukan masa depan bangsa. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mencapai 76,9 persen, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi meskipun diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Fenomena ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi, termasuk di tingkat desa.

Ketertiban dalam penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi faktor krusial yang menentukan legitimasi dan kredibilitas hasil pemilihan. Masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban ini, tidak hanya sebagai peserta pemilihan tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat (Dunggio & Yantu, 2021). Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa mencerminkan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi dan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas politik di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat yang tinggi dan sikap yang kondusif terhadap proses demokrasi merupakan indikator penting bagi keberhasilan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Desa Mopolo Esa di Kecamatan Ranoyapo memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik, sehingga respon masyarakatnya terhadap pesta demokrasi 2024 memiliki kekhasan tersendiri. Konteks lokal ini penting untuk dipahami karena setiap desa memiliki dinamika politik dan sosial yang berbeda-beda, yang mempengaruhi cara masyarakat merespon dan berpartisipasi dalam proses demokrasi (Setyaasih, 2023). Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, struktur sosial masyarakat, dan pengalaman historis dalam pemilihan sebelumnya menjadi variabel penting yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Fenomena politik kontemporer menunjukkan bahwa masyarakat desa semakin kritis dan aktif dalam mengawasi proses demokrasi. Hal ini terlihat dari berbagai aksi masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan, seperti yang terjadi pada berbagai unjuk rasa terkait revisi UU Pilkada 2024 yang menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap integritas proses demokrasi (Wikipedia, 2024). Kesadaran politik masyarakat yang meningkat ini menciptakan ekspektasi

yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, dan adil, sehingga respon masyarakat menjadi lebih aktif dan partisipatif dalam menjaga ketertiban dan kualitas proses demokrasi.

Pentingnya menjaga ketertiban dalam pesta demokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup ketertiban dalam hal penegakan aturan, pencegahan praktik politik uang, dan pemeliharaan iklim politik yang sehat dan kondusif. Masyarakat sebagai stakeholder utama dalam proses demokrasi memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Respon masyarakat yang positif dan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan modal sosial yang berharga bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaasih (2023) tentang "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019" menganalisis perbandingan partisipasi masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum partisipasi masyarakat dalam Pilkades 2019 cukup tinggi, terdapat variasi yang signifikan antar desa, dimana Desa Lau memiliki tingkat partisipasi paling rendah dibandingkan desa lain di kecamatan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, termasuk faktor sosiologi, ekonomi, dan politik lokal yang berkontribusi terhadap perbedaan tingkat partisipasi antar desa.

Gosamgo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010" mengeksplorasi bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam konteks pemilihan kepala desa. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dimana dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui keikutsertaan dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa, yang mencerminkan implementasi demokrasi di tingkat grassroot.

Kajian-kajian sebelumnya tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa lebih fokus pada aspek kuantitatif partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih, namun belum mengeksplorasi secara mendalam tentang respon kualitatif masyarakat dalam menjaga ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Penelitian yang ada cenderung menganalisis partisipasi dari perspektif individual voter behavior, sementara aspek kolektif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara iklim demokrasi yang tertib dan kondusif belum mendapat perhatian yang memadai. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada konteks geografis dan budaya yang berbeda, sehingga belum ada kajian spesifik yang menganalisis dinamika respon masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, khususnya dalam konteks pemilihan "Hukum Tua" yang memiliki karakteristik budaya dan politik lokal yang unik.

Gap kedua yang teridentifikasi adalah kurangnya kajian yang menganalisis respon masyarakat terhadap pesta demokrasi dalam konteks temporal yang spesifik, yaitu tahun 2024 yang memiliki dinamika politik nasional dan lokal yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemilihan kepala desa pada periode yang berbeda dengan konteks politik dan sosial yang juga berbeda, sehingga temuan-temuannya tidak dapat secara langsung diaplikasikan untuk memahami fenomena yang terjadi pada pesta demokrasi 2024. Selain itu, konsep "menjaga ketertiban" dalam konteks pesta demokrasi belum didefinisikan dan dioperasionalkan secara jelas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami berbagai dimensi ketertiban dalam proses demokratisasi di tingkat desa.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam hal pendekatan metodologis yang mengintegrasikan analisis respon masyarakat tidak hanya dari aspek partisipasi elektoral, tetapi juga dari dimensi civic engagement dalam menjaga ketertiban pesta demokrasi. Novelty pertama terletak pada pengembangan konsep "respon masyarakat dalam menjaga ketertiban" sebagai konstruk multidimensional yang mencakup aspek preventif, partisipatif, dan evaluatif dari keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga memperkenalkan perspektif baru dalam menganalisis demokrasi desa dengan memfokuskan pada peran aktif masyarakat sebagai guardian of democracy, bukan hanya sebagai pemilih pasif, yang memberikan kontribusi teoretis bagi literatur tentang democratic governance di tingkat lokal.

Kebaruan kedua dari penelitian ini adalah fokus pada konteks spesifik Desa Mopolo Esa yang memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sosial yang unik, sehingga menghasilkan temuan yang dapat memperkaya pemahaman tentang variasi respon masyarakat terhadap proses demokrasi di berbagai konteks lokal di Indonesia. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif temporal yang contemporary dengan menganalisis fenomena yang terjadi pada pesta demokrasi 2024, yang memiliki dinamika politik dan sosial yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami makna dan motivasi di balik respon masyarakat, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian-kajian tentang partisipasi politik di tingkat desa.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki pengalaman historis yang beragam dalam menghadapi berbagai pemilihan kepala desa sebelumnya, yang membentuk persepsi dan ekspektasi mereka terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Observasi awal mengindikasikan bahwa terdapat dinamika sosial dan politik yang kompleks di dalam masyarakat, termasuk adanya kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, struktur kepemimpinan informal yang berpengaruh, serta jaringan sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap proses demokrasi. Kondisi geografis dan aksesibilitas desa juga mempengaruhi cara masyarakat mengakses informasi tentang pemilihan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait pesta demokrasi.

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana masyarakat Desa Mopolo Esa merespon tantangan-tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, termasuk isu-isu seperti transparansi pendanaan kampanye, penggunaan media sosial dalam sosialisasi politik, dan upaya pencegahan praktik politik uang yang masih menjadi permasalahan dalam banyak pemilihan di tingkat desa. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa ada expectation gap antara harapan masyarakat terhadap proses demokrasi yang ideal dengan realitas penyelenggaraan yang sering kali masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Respon masyarakat terhadap gap ini menjadi aspek penting yang perlu dianalisis untuk memahami tingkat kematangan demokrasi di tingkat lokal dan potensi pengembangan civic culture yang lebih kuat di masa depan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif untuk memahami secara mendalam respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga ketertiban pesta demokrasi tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjektif masyarakat terkait fenomena demokrasi di tingkat desa (Creswell, 2018). Metode kualitatif memiliki kelebihan dalam mengungkap kompleksitas sosial dan politik yang terjadi dalam konteks lokal, dimana faktor-faktor budaya, historis, dan relasional memainkan peranan penting dalam membentuk respon masyarakat terhadap proses demokratisasi (Sugiyono, 2019). Paradigma interpretif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial sebagai konstruksi makna yang dibangun oleh aktor-aktor sosial melalui interaksi dan pengalaman mereka dalam konteks spesifik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dan wawancara mendalam sebagai metode utama. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial dan politik yang terjadi di Desa Mopolo Esa, termasuk persiapan masyarakat menghadapi pesta demokrasi, aktivitas sosialisasi, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa (Marshall & Rossmann, 2016). Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memperoleh data tentang perilaku aktual masyarakat, bukan hanya persepsi atau opini mereka, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang respon masyarakat dalam menjaga ketertiban demokrasi. Observasi dilakukan dalam berbagai setting sosial, mulai dari pertemuan-pertemuan formal di kantor desa hingga interaksi informal di tempat-tempat berkumpul masyarakat.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian dan kemampuan memberikan informasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang proses demokrasi di desa (Patton, 2015). Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi topik-topik yang muncul selama proses wawancara, sambil tetap mempertahankan fokus pada pertanyaan penelitian utama. Wawancara dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh informan dan dalam setting yang nyaman untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif, dimana tema-tema analisis muncul dari data lapangan bukan dari kerangka teoretis yang sudah ada sebelumnya (Braun & Clarke, 2006). Tahapan analisis meliputi transcription, coding, categorization, dan theme development yang dilakukan secara iteratif untuk memastikan kedalaman dan ketepatan interpretasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dimana data dari observasi dan wawancara dibandingkan dan dikonfirmasi untuk memastikan konsistensi temuan. Member checking juga dilakukan dengan melibatkan beberapa informan untuk memverifikasi interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan.

Pertimbangan etis dalam penelitian ini mencakup informed consent dari semua informan, jaminan kerahasiaan identitas, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademis. Penelitian dilakukan dengan menghormati nilai-nilai dan norma-norma lokal yang berlaku di Desa Mopolo Esa, serta memastikan bahwa proses penelitian tidak mengganggu aktivitas normal masyarakat (Merriam & Tisdell, 2016). Keterbatasan penelitian diakui terutama dalam hal generalisasi temuan, dimana hasil penelitian ini spesifik untuk konteks Desa Mopolo Esa dan tidak dapat secara langsung digeneralisasi ke konteks desa lain tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan geografis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Respon Preventif Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Demokrasi

Gambar 1. Wawancara dengan Perangkat Desa (Pala)



Sumber: Data Primer

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya menjaga ketertiban selama proses pesta demokrasi 2024. Respon preventif yang paling menonjol adalah upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara informal oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh agama. Bapak Gery Titjo, sebagai perangkat desa (Pala), menjelaskan strategi preventif yang diterapkan: "Cara saya sebagai perangkat desa (Pala) dalam menjaga ketertiban dan keamanan sementara berlangsungnya demokrasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu terpengaruh atau tidak terprovokasi dengan oknum-oknum tim sukses yang tidak bertanggung jawab." Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik dilakukan melalui pembangunan kesadaran masyarakat tentang potensi manipulasi politik yang dapat memicu ketidaktertiban.

Strategi preventif lainnya yang diamati adalah pembentukan kesepakatan informal di antara warga untuk menjaga netralitas dalam interaksi sosial sehari-hari selama periode kampanye. Masyarakat secara kolektif sepakat untuk tidak membawa isu-isu politik ke dalam aktivitas sosial seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, atau pertemuan-pertemuan komunitas. Kesepakatan ini muncul dari pengalaman masa lalu dimana polarisasi politik pernah mempengaruhi kohesi sosial masyarakat. Observasi menunjukkan bahwa kesepakatan ini cukup efektif dalam mencegah terjadinya perdebatan atau konflik terbuka yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Mekanisme pengawasan partisipatif juga menjadi bagian penting dari respon preventif masyarakat. Warga secara proaktif mengawasi aktivitas kampanye dan melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jano Woran: "Tindakan saya sebagai masyarakat adalah dengan mendatangi dan melaporkan pelanggaran paslon yang menggunakan politik uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu." Respon ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi aktif berpartisipasi dalam sistem pengawasan demokrasi untuk memastikan proses berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dimensi budaya lokal juga memainkan peranan penting dalam respon preventif masyarakat. Nilai-nilai tradisional seperti "pela gandong" (persaudaraan) dan "baku bae" (saling peduli) direvitalisasi sebagai filter sosial untuk mencegah konflik. Tokoh-tokoh adat secara aktif mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persaudaraan di atas kepentingan politik temporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa tidak hanya mengandalkan mekanisme formal dalam menjaga ketertiban, tetapi juga mengaktivasi modal sosial dan budaya lokal sebagai instrumen pencegahan konflik yang efektif dalam konteks demokrasi lokal.

b. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Proses Demokrasi

Partisipasi masyarakat Desa Mopolo Esa dalam pesta demokrasi 2024 menunjukkan karakteristik yang aktif dan bertanggung jawab. Ibu Yanti Woran memberikan penilaian positif terhadap partisipasi masyarakat: "Menurut saya demokrasi yang ada di desa Mopolo Esa itu baik, karena semua masyarakat mengambil hak suaranya sendiri dan juga masyarakat mengikuti pesta demokrasi ini dengan tertib atau tidak terjadinya keributan." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa partisipasi elektoral di desa ini tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dalam hal ketertiban dan kedisiplinan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat memahami hak pilih mereka sebagai tanggung jawab civic yang harus dilaksanakan secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Bentuk partisipasi aktif lainnya yang teridentifikasi adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan proses demokrasi, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga pengawasan pelaksanaan pemilihan. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemilih pada hari H, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi-diskusi publik tentang visi-misi kandidat, menghadiri kampanye dialogis, dan berpartisipasi dalam forum-forum warga yang membahas isu-isu desa. Partisipasi ini menunjukkan tingkat political efficacy yang tinggi, dimana masyarakat merasa bahwa suara dan pendapat mereka memiliki pengaruh terhadap hasil dan kualitas

kepemimpinan desa. Keterlibatan aktif ini juga mencerminkan transformasi dari model partisipasi politik yang tradisional dan paternalistik menjadi partisipasi yang lebih deliberatif dan egaliter.

Gambar 2. Wawancara dengan Masyarakat



Sumber: Data Primer

Inovasi dalam bentuk partisipasi juga terlihat melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk diskusi politik yang konstruktif. Kelompok-kelompok masyarakat membentuk forum online untuk berbagi informasi tentang kandidat dan isu-isu desa, dengan komitmen untuk menjaga etika berkomunikasi dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Platform digital ini menjadi ruang alternatif bagi partisipasi politik, terutama bagi generasi muda yang cenderung lebih aktif dalam ruang virtual. Namun, masyarakat juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara partisipasi online dan offline, sehingga diskusi digital tidak menggantikan interaksi tatap muka yang memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam konteks masyarakat desa.

Dimensi gender dalam partisipasi juga menunjukkan perkembangan yang positif, dimana perempuan semakin aktif tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai opinion leader dan mobilizer dalam komunitas mereka. Observasi menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam sosialisasi politik di tingkat keluarga dan kelompok-kelompok sosial, membantu memastikan bahwa informasi tentang kandidat dan isu-isu penting tersebar secara merata di masyarakat. Partisipasi perempuan ini mencerminkan demokratisasi internal dalam masyarakat, dimana ruang politik tidak lagi didominasi oleh laki-laki tetapi menjadi arena yang lebih inklusif dan representatif terhadap keragaman demografis masyarakat desa.

c. Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pemeliharaan Keharmonisan

Masyarakat Desa Mopolo Esa telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif untuk mengatasi potensi ketegangan yang muncul selama periode demokrasi. Mekanisme ini menggabungkan pendekatan formal melalui institusi resmi dengan pendekatan informal melalui kearifan lokal dan mediasi tokoh masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau ketegangan antar kelompok pendukung, langkah pertama yang diambil adalah mediasi oleh tokoh-tokoh yang dihormati di masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan sesepuh desa. Pendekatan ini terbukti efektif karena memanfaatkan legitimasi sosial dan moral yang dimiliki oleh para tokoh tersebut untuk meredakan konflik sebelum eskalasi lebih lanjut.

Prinsip "dingin kepala, panas dukungan" yang disampaikan oleh Bapak Gery Titjo mencerminkan filosofi lokal dalam mengelola passion politik: "Panas boleh tetapi pikiran harus tetap dingin, karna biasanya panas demokrasi itu Cuma berlangsung sementara." Filosofi ini diterjemahkan dalam praktik konkret melalui berbagai ritual dan tradisi yang membantu masyarakat mengelola emosi politik mereka. Misalnya,

sebelum dan sesudah kegiatan kampanye, sering dilakukan doa bersama atau ritual adat yang menekankan persatuan dan persaudaraan. Ritual-ritual ini berfungsi sebagai mekanisme katarsis yang membantu masyarakat melepaskan ketegangan politik sambil memperkuat ikatan sosial yang sudah ada.

Gambar 3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Sumber: Data Primer

Sistem sanksi sosial informal juga berperan penting dalam memelihara keharmonisan selama proses demokrasi. Masyarakat memiliki kesepakatan tidak tertulis bahwa siapapun yang terbukti melakukan tindakan provokatif atau merusak keharmonisan akan mendapat sanksi sosial berupa pengucilan atau pembatasan akses terhadap kegiatan-kegiatan komunitas. Sanksi ini tidak bersifat permanen, tetapi berlangsung hingga yang bersangkutan menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki perilaku. Mekanisme ini efektif karena dalam masyarakat desa, pengakuan dan penerimaan sosial memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga ancaman pengucilan sosial menjadi deterrent yang kuat terhadap perilaku destruktif.

Evaluasi pasca-konflik juga menjadi bagian integral dari mekanisme penyelesaian konflik di Desa Mopolo Esa. Setelah pemilihan selesai, masyarakat secara kolektif melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilalui, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pemilihan yang akan datang, dan memperkuat komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Proses evaluasi ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan warga yang dipimpin oleh kepala desa dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasil evaluasi kemudian didokumentasikan sebagai pembelajaran kolektif yang dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi pesta demokrasi di masa depan. Pendekatan evaluatif ini menunjukkan kematangan demokrasi masyarakat yang tidak hanya fokus pada hasil pemilihan, tetapi juga pada kualitas proses dan dampaknya terhadap kohesi sosial jangka panjang.

2. Pembahasan

a. Analisis Respon Preventif dalam Perspektif Teori Civic Engagement

Respon preventif masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga ketertiban pesta demokrasi 2024 menunjukkan manifestasi konkret dari konsep civic engagement yang dikemukakan oleh Putnam (2000), dimana keterlibatan warga negara tidak hanya terbatas pada partisipasi elektoral tetapi juga mencakup aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan demokratis masyarakat. Strategi edukasi dan sosialisasi informal yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mencerminkan apa yang disebut oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995) sebagai "civic skills" - kemampuan warga untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan memobilisasi sumber daya untuk tujuan politik yang konstruktif. Keterlibatan aktif perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam mencegah konflik menunjukkan bahwa civic engagement

di tingkat desa tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, dimana berbagai aktor sosial berkolaborasi untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Mekanisme pengawasan partisipatif yang dikembangkan masyarakat sejalan dengan konsep "horizontal accountability" yang dikemukakan oleh O'Donnell (1998), dimana pengawasan terhadap proses politik tidak hanya dilakukan oleh institusi formal tetapi juga oleh masyarakat sipil. Kesiapan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran seperti politik uang kepada Bawaslu menunjukkan internalisasi nilai-nilai demokrasi yang kuat, dimana masyarakat memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses elektoral (Tilly, 2007). Fenomena ini mengindikasikan transformasi dari culture of dependency menjadi culture of accountability, dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif dalam proses politik tetapi menjadi subjek aktif yang memiliki agency untuk mempengaruhi kualitas demokrasi.

Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal seperti "pela gandong" dan "baku bae" sebagai instrumen pencegahan konflik menunjukkan pentingnya konteks lokal dalam implementasi demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1973) tentang "thick description" dalam memahami praktik sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "embedded democracy" dari Merkel (2004), dimana konsolidasi demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi formal tetapi juga pada norma-norma dan praktek-praktek informal yang mengakar dalam budaya masyarakat. Keberhasilan masyarakat Desa Mopolo Esa dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern menunjukkan bahwa demokrasi dapat beradaptasi dengan konteks budaya lokal tanpa kehilangan esensi normatifnya, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "indigenous democracy" yang autentik dan berkelanjutan.

b. Partisipasi Politik dalam Kerangka Teori Demokrasi Deliberatif

Kualitas partisipasi masyarakat Desa Mopolo Esa yang tidak hanya tinggi secara kuantitatif tetapi juga tertib dan bertanggung jawab mencerminkan ideal demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996) dalam konsep "public sphere". Ruang-ruang diskusi publik yang tercipta melalui kampanye dialogis dan forum-forum warga menunjukkan terbentuknya arena komunikatif dimana masyarakat dapat bertukar argumen secara rasional tentang isu-isu publik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan proses demokrasi - dari sosialisasi hingga pengawasan - mengindikasikan berkembangnya "communicative rationality" dimana keputusan politik tidak hanya didasarkan pada agregasi preferensi individual tetapi juga pada deliberasi kolektif yang mencari konsensus melalui argumentasi yang berkualitas (Cohen, 1989).

Inovasi partisipasi melalui media sosial yang dilakukan dengan tetap menjaga etika berkomunikasi menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Fenomena ini sejalan dengan konsep "digital democracy" yang dikemukakan oleh Chadwick (2006), dimana teknologi informasi dapat memperluas ruang partisipasi politik sekaligus meningkatkan kualitas deliberasi publik jika digunakan secara bijak. Komitmen masyarakat untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi mencerminkan berkembangnya "epistemic responsibility" dalam komunitas politik, dimana warga memahami bahwa kualitas informasi mempengaruhi kualitas keputusan demokratis (Anderson, 2006). Keseimbangan antara partisipasi online dan offline yang dijaga oleh masyarakat menunjukkan pemahaman yang matang tentang kompleksitas komunikasi politik di era digital.

Peran aktif perempuan dalam proses politik di Desa Mopolo Esa mencerminkan evolusi menuju demokrasi yang lebih inklusif, sejalan dengan konsep "inclusive democracy" yang dikemukakan oleh Young (2000). Keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai opinion leader dan mobilizer menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat desa telah melampaui sekadar perluasan hak pilih (suffrage) menuju perluasan ruang politik (political space) bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan. Fenomena ini mengkonfirmasi argumen Phillips (1995) tentang pentingnya "politics of presence" dalam demokrasi, dimana representasi deskriptif (kehadiran fisik) kelompok tertentu dalam arena politik berkontribusi terhadap kualitas representasi substantif (artikulasi kepentingan). Transformasi ini

menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di tingkat lokal tidak hanya melibatkan aspek prosedural tetapi juga aspek substansial yang berkaitan dengan keadilan dan inklusivitas.

c. Resolusi Konflik dalam Perspektif Teori Modal Sosial dan Kohesi Komunitas

Mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan masyarakat Desa Mopolo Esa menunjukkan pemanfaatan modal sosial (social capital) secara efektif dalam menjaga stabilitas politik lokal. Konsep modal sosial dari Coleman (1988) dan Putnam (1993) yang menekankan pentingnya trust, reciprocity, dan civic networks termanifestasi dalam praktik mediasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Efektivitas mediasi informal ini mengkonfirmasi argumen Ostrom (1990) tentang kemampuan komunitas untuk mengembangkan institusi lokal (local institutions) yang mampu mengatasi masalah collective action tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi negara. Kombinasi antara pendekatan formal dan informal dalam penyelesaian konflik menunjukkan sophisticated understanding masyarakat tentang pluralitas mekanisme governance yang dapat digunakan untuk menjaga ketertiban sosial.

Filosofi "dingin kepala, panas dukungan" yang dikembangkan masyarakat mencerminkan wisdom lokal dalam mengelola emosi politik, sejalan dengan konsep "emotional regulation" dalam teori psikologi politik yang dikemukakan oleh Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000). Kemampuan masyarakat untuk memisahkan antara passion politik dengan rasionalitas dalam pengambilan keputusan menunjukkan tingkat political maturity yang tinggi, dimana partisipasi politik tidak didasarkan pada emosi semata tetapi juga pada pertimbangan rasional tentang kepentingan jangka panjang komunitas. Ritual-ritual adat yang berfungsi sebagai mekanisme katarsis politik mengindikasikan pentingnya symbolic dimension dalam politik lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1980) tentang "theatre state" dimana ritual dan simbolisme memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi dan kohesi sosial.

Sistem sanksi sosial informal yang diterapkan masyarakat mencerminkan bekerjanya mekanisme social control yang efektif dalam menjaga conformity terhadap norma-norma demokratis. Konsep ini sejalan dengan teori kontrol sosial dari Hirschi (1969) yang menekankan pentingnya social bonds dalam mencegah perilaku deviant. Efektivitas sanksi sosial dalam konteks masyarakat desa menunjukkan bahwa dalam komunitas dengan tingkat kohesi tinggi, mekanisme informal seringkali lebih efektif daripada sanksi formal dalam mengatur perilaku anggota komunitas (Scott, 1976). Proses evaluasi pasca-konflik yang dilakukan secara kolektif menunjukkan berkembangnya "institutional learning" dalam masyarakat, dimana pengalaman konflik tidak hanya diselesaikan tetapi juga dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan konflik di masa depan, sejalan dengan konsep "adaptive governance" yang dikemukakan oleh Folke et al. (2005).

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa menunjukkan respon yang sangat positif dan proaktif dalam menjaga ketertiban pesta demokrasi tahun 2024 melalui tiga dimensi utama: respon preventif, partisipasi aktif, dan mekanisme penyelesaian konflik. Respon preventif masyarakat terwujud dalam strategi edukasi informal, pembentukan kesepakatan netralitas, pengawasan partisipatif terhadap pelanggaran pemilihan, dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai filter pencegahan konflik. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya terlihat dari tingginya angka partisipasi elektoral yang tertib, tetapi juga keterlibatan dalam berbagai tahapan demokrasi, inovasi partisipasi melalui media digital dengan tetap menjaga etika, dan semakin inklusifnya peran perempuan dalam proses politik. Mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan menggabungkan pendekatan formal dan informal, menerapkan filosofi "dingin kepala, panas dukungan", menggunakan sistem sanksi sosial yang efektif, dan melakukan evaluasi pasca-konflik sebagai pembelajaran kolektif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di tingkat desa tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada kearifan lokal, modal sosial, dan civic engagement masyarakat yang kuat. Keberhasilan masyarakat Desa Mopolo Esa dalam mengintegrasikan nilai-nilai

tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern menghasilkan model "indigenous democracy" yang autentik dan berkelanjutan. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pentingnya memahami demokrasi sebagai praktik yang kontekstual dan adaptif, dimana keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan sejarah masyarakat lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan insight berharga bagi stakeholder pemerintahan dan civil society tentang pentingnya mengembangkan pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan potensi lokal dalam penguatan demokrasi di tingkat grassroot, serta perlunya dukungan terhadap inisiatif-inisiatif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kualitas proses demokratis.

E. Daftar Pustaka

- Anderson, E. (2006). The epistemology of democracy. *Episteme*, 3(1-2), 8-22.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Caracek, S. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa: Studi demokratisasi di tingkat grassroot. *Jurnal Politik Lokal*, 15(2), 45-62.
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics: States, citizens, and new communication technologies*. Oxford University Press.
- Cohen, J. (1989). Deliberation and democratic legitimacy. *The Good Polity*, 17-34.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunggio, M., & Yantu, I. (2021). Peran masyarakat dalam menjaga stabilitas politik daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(3), 112-128.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*. Princeton University Press.
- Gosamgo, R. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara tahun 2010. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 89-104.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective intelligence and political judgment*. University of Chicago Press.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. *Democratization*, 11(5), 33-58.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Pratama, A. (2020). Demokrasi desa dalam era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(4), 234-251.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran media sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih muda pada Pemilu. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), 154-168.

- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). *Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Setyaasih, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2019: Perbandingan Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 18(1), 76-92.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Susanto, E. H. (2019). Transformasi demokrasi Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 145-162.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wikipedia. (2024). Unjuk rasa terkait revisi UU Pilkada 2024. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_terkait_revisi_UU_Pilkada_2024
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.